

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA BARAT**



Oleh:

SAMUEL D. EBENHAEZER SIANTURI

(01021381924098)

EKONOMI PEMBANGUNAN

diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Disusun oleh:

Nama : Samuel D Ebenhaezer Sianturi

NIM : 01021381924098

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Ekonomi Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 09 Oktober 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

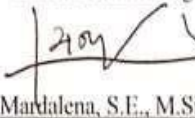
Palembang, 27 Oktober 2023

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP.196007101989031001

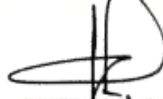
Dosen Pembimbing


Mardalena, S.E., M.Si

NIP.197804212014092004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP.197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN

30-10-2023

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Samuel D Ebenhaezer Sianturi

NIM : 01021381924098

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Pembimbing : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Tanggal Ujian : 9 Oktober 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri, Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 26 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Samuel D Ebenhaezer Sianturi

01021381924098

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 30-10-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

ABSTRAK

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

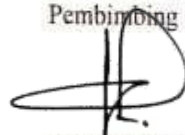
Samuel D Ebenhaezer Sianturi, Didik Susetyo

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model (FEM)*. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai variabel dependen dan variabel independen berupa Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: *Dana Perimbangan, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia*

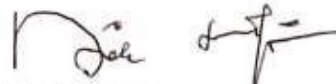
Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
Pembimbing



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304052010121001

Dosen



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 197609112014091003

ABSTRAK

The Influence of Equalization Funds, Capital Expenditure, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the Human Development Index of Districts/Cities in the West Java Province

By:

Samuel D Ebenhaezer Sianturi, Didik Susetyo

This research aims to determine the influence of Equalization Funds, Capital Expenditure, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the Human Development Index (HDI) of districts/cities in the West Java Province. The study utilizes secondary data sourced from the Directorate General of Treasury of the West Java Province and the Central Bureau of Statistics of the West Java Province. The analytical technique employed in this research is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) method. The Human Development Index of districts/cities in the West Java Province serves as the dependent variable, while the independent variables include Equalization Funds, Capital Expenditure, and Gross Regional Domestic Product (GRDP). The results of this study indicate that Fiscal Equalization Funds have a positive and significant influence on the Human Development Index of districts/cities in the West Java Province. Capital Expenditure does not have a significant influence on the Human Development Index of districts/cities in the West Java Province, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a positive and significant influence on the Human Development Index of districts/cities in the West Java Province.

Keywords: Equalization Funds, Capital Expenditure, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index

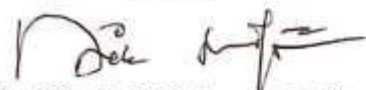
Acknowledge by,

Head of the Department of Economic Development



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304052010121001

Advisor



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 197609112014091003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Peneliti.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Human Capital.....	12
2.1.2 Teori Penerimaan Pemerintah.....	12
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	15
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	17
2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia Baru	18
2.1.4.2 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	21
2.1.5 Dana Perimbangan	22
2.1.5.1 Sumber-sumber Dana Perimbangan	22
2.1.5.2 Hubungan Dana Perimbangan dengan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat	23

2.1.6 Belanja Modal	25
2.1.6.1 Jenis-jenis Belanja Modal.....	25
2.1.6.2 Peranan Belanja Modal.....	27
2.1.6.3 Faktor-faktor mempengaruhi Belanja Modal	27
2.1.6.4 Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat	29
2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	29
2.1.7.1 Metode Penghitungan PDRB.....	30
2.1.8 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran	37
2.4 Hipotesis Penelitian	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	40
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4 Populasi dan Sampel.....	41
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	41
3.6 Teknik Analisis Data	46
3.6.1 Analisis Regresi Data Panel	46
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik	47
3.6.3 Pengujian Kesesuain Model.....	49
3.6.4 Pengujian Hipotesis	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	53
4.1.1 Kondisi Gambaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	54
4.1.2 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	55
4.1.3 Pertumbuhan Penerimaan Dana Perimbangan	58
4.1.4 Pertumbuhan Penerimaan Belanja Modal	62
4.1.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	65
4.2 Hasil Penelitian	68
4.2.1 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	69
4.2.2 Pemilihan Model Terbaik.....	69

4.2.3 Hasil Regresi Metode Fixed Effect Model	70
4.2.4 Tahapan Pengujian Model Terbaik	71
4.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	72
4.2.6 Uji Hipotesis	73
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	76
4.3.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat	76
4.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.....	77
4.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.....	78
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan Penelitian	80
5.3 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	3
Tabel 1.2 Dana Perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	5
Tabel 1.3 Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	7
Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	8
Tabel 4.1 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	56
Tabel 4.2 Pertumbuhan Dana Perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021	59
Tabel 4.3 Pertumbuhan Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021	63
Tabel 4.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021	65
Tabel 4.5 Hasil Estimasi CEM, FEM dan REM	69
Tabel 4.6 Pemilihan Model Terbaik.....	70
Tabel 4.7 Uji Chow	71
Tabel 4.8 Uji Hausman	72
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas.....	72
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	73
Tabel 4.12 Uji F (Serempak).....	74
Tabel 4.13 Uji t-statistik	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 2.2 Kurva Uji t-statistik	51
Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dana Perimbangan, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia	87
Lampiran 2 Hasil Analisis Regresi Linear Data Panel	94
Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik.....	94
Lampiran 4 Uji Hipotesis	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan atau kinerja ekonomi daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro, 2006). Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil per kapita meningkat dalam waktu lama. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Arsyad,1992).

Pembangunan ekonomi dijadikan tujuan utama negara-negara di dunia ketika mengejar ketertinggalan pola pembangunan negara maju. Salah satu cara meningkatkan pembangunan ekonomi yang tinggi ialah dengan lebih memfokuskan pembangunan pada sektor tersier. Sektor tersier sendiri mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor primer. Perubahan struktur ekonomi ini diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja.

Terdapat beberapa riset yang telah menjelaskan ikatan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar menegaskan jika sumber daya manusia kerap dilihat sebagai katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu,

pertumbuhan ekonomi yang cepat saja tidak mengarah pada kenaikan penyediaan layanan kepada penduduk secara totalitas. Pengembangan kemampuan Indeks Pembangunan Manusia mendorong percepatan transisi suatu negara yang masih tumbuh jadi negara maju. Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang sangat berguna dalam menunjang pembangunan perekonomian Indonesia sebab sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kedudukan sentral dalam mengelola sumber daya yang dimiliki di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal fisik serta akumulasi modal manusia. Kedua kategori modal tersebut menggambarkan aspek yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Yulianita dan Susetyo, 2017).

Menurut definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum adalah cara untuk mengukur tingkat pencapaian dalam pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia ini dapat mengukur tingkat pencapaian kualitas pembangunan manusia agar dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pembangunan manusia adalah sebuah konsep yang mempelajari aspek kualitatif dan kuantitatif dari keberadaan untuk mempromosikan dan mengembangkan kesejahteraan manusia. Sumber daya manusia juga cenderung berkinerja lebih baik secara finansial. Menurut tingkat kualitas sumber daya manusia seperti perawatan kesehatan, pendidikan atau indikator lainnya, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa laporan pembangunan manusia UNDP. Oleh karena itu, pembangunan manusia juga diperlukan dalam konteks regional (Brata, 2002).

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bogor	69.13	69.69	70.65	70.40	70.60
2	Sukabumi	65.49	66.05	66.87	66.88	67.07
3	Cianjur	63.70	64.62	65.38	65.36	65.56
4	Bandung	71.02	71.75	72.41	72.39	72.73
5	Garut	64.52	65.42	66.22	66.12	66.45
6	Tasikmalaya	64.14	65.00	65.64	65.67	65.90
7	Ciamis	68.87	69.63	70.39	70.49	70.93
8	Kuningan	67.78	68.55	69.12	69.38	69.71
9	Cirebon	67.39	68.05	68.69	68.75	69.12
10	Majalengka	65.92	66.72	67.52	67.59	67.81
11	Sumedang	70.07	70.99	71.46	71.64	71.80
12	Indramayu	65.58	66.36	66.97	67.29	67.64
13	Subang	67.73	68.31	68.69	68.95	69.13
14	Purwakarta	69.28	69.98	70.67	70.82	70.98
15	Karawang	69.17	69.89	70.86	70.66	70.94
16	Bekasi	72.63	73.49	73.99	74.07	74.45
17	Bandung Barat	66.63	67.46	68.27	68.08	68.29
18	Pangandaran	66.60	67.44	68.21	68.06	68.28
19	Kota Bogor	75.16	75.66	76.23	76.11	76.59
20	Kota Sukabumi	73.03	73.55	74.31	74.21	74.60
21	Kota Bandung	80.31	81.06	81.62	81.51	81.96
22	Kota Cirebon	74.00	74.35	74.92	74.89	75.25
23	Kota Bekasi	80.30	81.04	81.59	81.50	81.95
24	Kota Depok	79.83	80.29	80.82	80.97	81.37
25	Kota Cimahi	76.95	77.56	78.11	77.83	78.06
26	Kota Tasikmalaya	71.51	72.03	72.84	73.04	73.31
27	Kota Banjar	70.79	71.25	71.75	71.70	71.92

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia diantara 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang cenderung semakin tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur termasuk pada kategori perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2021, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi termasuk pada kategori perkembangan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi meningkat.

Selama tahun 2017-2021 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia disemua kabupaten/kota mengalami kenaikan dengan cepat dan sebaliknya ada pula kabupaten/kota dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia relatif lambat. Indeks Pembangunan Manusia setiap tahun dipengaruhi oleh naik turunnya komponen-komponen pembentukan yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran rill per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia pada suatu wilayah akan semakin tinggi bila ketiga unsur (kesehatan, pendidikan dan standar ekonomi) bisa ditingkatkan (Risidiana, 2020). Menaikkan pembangunan manusia yang berdampak dalam kesejahteraan rakyat pada suatu wilayah maka dibutuhkan dana aturan pembangunan spesifik buat wilayah tadi yang berkaitan menggunakan desentralisasi ekonomi (Verawaty, 2021).

Tabel 1.2 Dana Perimbangan di Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bogor	2.770,88	2.836,31	3.174,38	7.687,18	3.151,78
2	Sukabumi	3.750,15	2.292,86	4.063,10	2.199,05	4.018,60
3	Cianjur	2.219,57	4.017,39	2.273,75	3.840,50	2.174,14
4	Bandung	3.031,10	3.171,92	3.396,92	3.058,02	3.388,63
5	Garut	2.701,57	2.642,90	2.873,91	2.585,28	2.771,08
6	Tasikmalaya	2.097,17	2.104,83	2.202,13	2.007,96	2.074,04
7	Ciamis	1.774,59	1.675,65	2.007,96	1.662,73	1.672,76
8	Kuningan	1.733,91	1.662,03	1.772,06	1.700,90	1.728,87
9	Cirebon	2.085,67	2.106,18	2.239,51	1.700,90	2.177,58
10	Majalengka	1.747,94	1.702,13	1.796,68	1.730,16	1.759,50
11	Sumedang	1.603,46	1.668,46	1.791,88	1.716,72	1.668,82
12	Indramayu	2.023,74	2.123,44	2.165,64	1.937,22	1.969,02
13	Subang	1.862,64	2.165,64	1.944,16	1.843,99	1.932,55
14	Purwakarta	1.269,12	1.256,12	1.262,24	1.259,19	1.312,52
15	Karawang	2.104,88	2.074,54	2.212,75	2.040,72	2.189,94
16	Bekasi	1.898,12	1.917,20	1.967,52	1.906,36	2.068,82
17	Bandung Barat	1.639,67	1.525,37	1.645,55	1.511,74	1.566,20
18	Pangandaran	813,67	805,28	900,95	821,79	884,08
19	Kota Bogor	1.084,72	1.066,76	1.165,49	1.117,72	1.136,71
20	Kota Sukabumi	712,07	727,47	747,69	719,48	749,31
21	Kota Bandung	2.333,15	2.427,24	2.488,57	2.512,92	2.505,96
22	Kota Cirebon	823,29	831,65	833,87	849,87	784,31
23	Kota Bekasi	1.701,26	1.653,96	1.752,07	1.714,04	1.736,67
24	Kota Depok	1.179,07	1.236,91	1.238,09	1.255,67	1.245,36
25	Kota Cimahi	881,66	792,53	843,67	890,13	830,96
26	Kota Tasikmalaya	1.176,68	1.145,17	1.168,95	1.091,90	1.127,36
27	Kota Banjar	534,12	537,39	533,07	572,96	536,22

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan (DJPK) Jawa Barat

Desentralisasi fiskal muncul karena kebijakan transfer antar pemerintah yang menjadi basis keuangan pemerintah daerah di banyak negara maju dan berkembang. Istilah umum "transfer" sering digunakan untuk merujuk pada sejumlah instrumen keuangan publik, hibah, subsidi, dan bahkan pembagian pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Transfer antar pemerintah digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan kebijakan yang luas (Martinez-Vazquez dan Boex, 1998).

Dari Tabel 1.2 yang menunjukkan besaran dana perimbangan antara 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cirebon termasuk pada kategori perkembangan dana perimbangan yang sangat tinggi. Sedangkan pada tahun 2020, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi dan Kota Banjar termasuk pada kategori pembangunan manusia yang sangat kecil. Perkembangan Dana Perimbangan tadi memperlihatkan adanya kesenjangan kebijakan pemerintah wilayah pada Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggunakannya secara bijak alokasi dana untuk mencapai hasil yang baik dalam meningkatkan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada manajemen pemerintah pusat (Darmawan, 2013).

Tabel 1.3 Belanja Modal di Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

No.	Kota/Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bogor	1.525,15	1.313,84	1.567,69	1.488,95	1.701,25
2	Sukabumi	545,84	614,38	603,79	449,10	510,59
3	Cianjur	823,21	928,61	690,65	384,91	384,53
4	Bandung	628,5	713,09	1.088,25	733,92	706,78
5	Garut	615,05	537,59	553,08	463,04	558,80
6	Tasikmalaya	566,13	524,84	636,91	567,24	239,41
7	Ciamis	452,17	442,37	520,32	416,80	402,63
8	Kuningan	327,88	221,66	251,91	378,70	320,73
9	Cirebon	609,50	510,92	587,83	296,95	361,54
10	Majalengka	605,77	681,60	643,66	792,44	590,73
11	Sumedang	498,57	410,35	605,70	498,50	353,17
12	Indramayu	776,09	769,88	982,69	317,73	306,79
13	Subang	486,43	486,21	458,84	257,95	371,02
14	Purwakarta	416,59	228,16	329,29	234,35	305,96
15	Karawang	745,20	697,60	703,20	277,22	955,60
16	Bekasi	971,09	853,62	954,90	670,12	726,06
17	Bandung Barat	400,09	264,54	338,00	470,09	346,13
18	Pangandaran	426,92	284,90	499,05	464,68	375,71
19	Kota Bogor	433,49	455,46	500,98	276,16	418,87
20	Kota Sukabumi	217,08	140,10	192,38	133,84	135,68
21	Kota Bandung	918,88	1.049,70	1.179,43	558,48	721,57
22	Kota Cirebon	220,22	175,69	269,92	294,35	113,10
23	Kota Bekasi	1.236,09	780,10	1.104,38	790,05	1.189,30
24	Kota Depok	857,24	770,05	926,09	705,05	701,37
25	Kota Cimahi	270,32	276,02	260,34	97,24	247,06
26	Kota Tasikmalaya	425,37	374,60	445,50	321,92	381,03
27	Kota Banjar	215,24	193,78	208,99	57,42	59,28

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan (DJPK) Jawa Barat

Tabel 1.3 menunjukkan perbedaan jumlah belanja modal 27 daerah di Jawa Barat yang meningkat dari tahun ke tahun. Kota Bandung, Kota Depok dan Provinsi Bogor tergolong daerah dengan belanja modal yang sangat tinggi. Sebaliknya Kota Banjar, Kota Sukabumi dan Kota Cimahi termasuk dalam belanja modal yang sangat kecil. Perbedaan belanja modal menunjukkan perbedaan prioritas kebijakan pemerintah daerah di Jawa Barat.

Tabel 1.4 PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bogor	139.561,45	148.203,35	156.876,01	154.113,60	159.589,55
Sukabumi	41.716,23	44.140,89	46.628,34	46.205,28	47.935,63
Cianjur	28.538,99	30.320,21	32.039,32	31.792,32	32.897,53
Bandung	73.039,45	77.613,22	82.547,44	81.060,97	83.949,37
Garut	35.464,91	37.225,15	39.092,49	38.598,43	39.981,19
Tasikmalaya	22.063,29	23.320,61	24.586,67	24.344,86	25.179,48
Ciamis	19.826,75	20.878,69	22.001,24	21.970,41	22.774,93
Kuningan	14.866,62	15.821,96	16.864,15	16.882,76	17.483,56
Cirebon	30.623,31	32.161,84	33.668,10	33.304,05	34.127,52
Majalengka	18.789,49	20.006,88	21.561,72	21.754,54	22.788,75
Sumedang	21.276,70	22.507,96	23.932,73	23.665,01	24.414,66
Indramayu	57.515,01	58.287,98	60.153,18	59.200,00	59.544,87
Subang	26.250,72	27.408,20	28.672,90	28.344,32	28.960,89
Purwakarta	42.239,30	44.341,65	46.278,21	45.293,24	46.840,15
Karawang	148.358,44	157.317,84	163.946,85	157.710,59	166.941,49
Bekasi	228.203,60	241.949,38	251.502,79	242.971,39	251.778,52
Bandung Barat	28.330,02	29.888,89	31.398,35	30.640,41	31.701,79
Pangandaran	6.939,64	7.308,73	7.742,87	7.738,97	8.022,78
Kota Bogor	28.654,97	30.413,57	32.295,73	32.162,74	33.372,48
Kota Sukabumi	7.780,42	8.209,92	8.664,02	8.534,72	8.851,05
Kota Bandung	172.851,96	185.084,18	197.642,89	193.144,95	200.414,03
Kota Cirebon	14.893,14	15.817,18	16.812,49	16.648,21	17.155,75
Kota Bekasi	62.202,01	65.845,09	69.406,53	67.619,24	69.796,94
Kota Depok	42.981,28	45.978,89	49.076,58	48.135,93	49.947,24
Kota Cimahi	19.907,13	21.192,60	22.856,04	22.340,56	23.275,78
Kota					
Tasikmalaya	14.027,95	14.859,11	15.746,12	15.430,02	15.980,75
Kota Banjar	2.919,72	3.067,11	3.221,45	3.251,76	3.365,25

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

Dari Tabel 1.4 yang menunjukkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat setiap tahunnya. Pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2017-2021, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor

termasuk pada kategori perkembangan PDRB yang sangat tinggi. Sedangkan pada tahun 2017-2021, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar termasuk pada kategori perkembangan PDRB yang sangat kecil.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dengan begitu semakin tingginya nilai PDRB maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan struktur ekonomi regional yang ideal melalui suatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan agar keputusan yang diambil dapat mencapai sasaran yang optimal dan tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam hal ini data statistik mempunyai peranan penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sekaligus untuk menentukan kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Variabel pendukung meliputi Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang diberikan, bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh alokasi dana perimbangan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah belanja modal yang digunakan memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Barat?

3. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai uraian latar belakang dan rumusan masalah yaitu :

1. Menganalisis alokasi Dana Perimbangan yang diterima memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Menganalisis Belanja Modal yang digunakan dapat memberikan dampak pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat memberikan dampak pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis membuat manfaat dari penelitian ini yaitu:

- 1) Manfaat Praktisi
 - a) Untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota

Studi ini diharapkan memberi masukan serta ekstra data buat pemerintah

daerah khususnya pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai andil dalam pengambilan keputusan serta pembentuk kebijakan yang ada hubungan dengan kenaikan indeks pembangunan manusia, sehingga menaikkan kesejahteraan yang bakal diperoleh penduduk.

b) Untuk pemerintah Provinsi

Studi ini diharapkan memberikan petunjuk buat pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat supaya dapat menciptakan kebijakan merata dalam alokasi dana buat setiap wilayah dalam menaikkan kesejahteraan penduduk.

c) Untuk pemerintah pusat

Studi ini diharapkan dapat membantu menciptakan kebijakan dalam pembagian anggaran tiap kabupaten/kota yang terdapat secara merata sanggup menaikkan kesejahteraan penduduk.

2) Buat Akademisi

a) Dapat menjadi acuan mahasiswa guna meninjau serta mendalami berkenaan dengan Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto serta faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di JawaBarat.

b) Diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman langsung kepada peneliti selanjutnya dengan konsep sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. D. P. D. B. M. T. K. D. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Ariana, R. (2016). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SILPA, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)*. 10(1), 1–23.
- Azka Barizati Almas. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Benedict Christian Hutapea, A. P. (2022). *Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Dana Perimbangan Terhadap Perekonomi Regional*. 6(2), 409–427.
- Imanulloh, D. W., & Purwanti, L. (2017). Pengaruh belanja modal, Pendapatan Asli Daerah, dan pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2013-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 1-15.

- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Fretes, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Febrianti, L. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 19-26.
- Firmansah, N. (2015). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi UII*, 2015, 1-32.
- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56–66. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216>
- Ichsan, A. Z. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia*. 1(1), 12–23.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pnegaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) di Kabupaten Bali. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84.

Magfira, A. F. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>

Mahuze, W., Masinambow, V. A. J., & Lopian, A. L. C. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), 1–12.

Marselina Ade Putri, A. D. A. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2014- 2019)). 2.*

Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 12–24. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>

Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 65–80.

- Riko Novianto, R. H. (n.d.). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 4(1), 1–22.
- Rineldis, A., & Bediona, K. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Upah Minum*.
- Saswatata, S. S., & Parju, P. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Serat Acitya*, 11(1), 17.
<https://doi.org/10.56444/sa.v11i1.2953>
- Siti Amrina Hasibuan, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357-366.
- Suranto. (2022). Pengaruh Dana Perimbangan (Dbh, Dau, & Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Sulawesi Selatan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 53–67.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.348>

- Susanti, E. (2017). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*, 9, 1689-1699.
- Thazafi, M. R. (2022). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020*.
- U. Sulia Sukmawati, Putri Ana, D. T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi , Manajemen, Dan Perbankan Syariah*, 2(April), 11–17.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jamasy/article/view/2680%0Ahttps://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jamasy/article/download/2680/1608>
- Verawaty, Jaya, A. K., & Puspanita, Intan, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37.
<https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Yulianita, A., & Susetyo, D. (2017). Human Capital And Economic Convergence In Indonesia : An Empirical Analysis. In *International Journal Of Scientific And Research Publications* (Vol. 7, Issue 7). [Www.Ijsrp.Org](http://www.ijsrp.org)